

KELANGKAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KEMISKINAN NELAYAN: AKIBAT PENETRASI KAPITALISME ATAU PRAKTEK KEBUDAYAAN?

Kusnadi

Antropolog Fakultas Ilmu Budaya dan Peneliti *Institute for Maritime Studies* (IMaS)
Universitas Jember (UNEJ)
E-mail: welfarestate@yahoo.co.id

ABSTRAK

Spirit kebudayaan nelayan yang mempersepsi sumber daya perikanan sebagai sumber daya tak terbatas, orientasi materialistik, dan kompetisi terbuka meraih prestasi bersinergi secara dialektis dengan penetrasi kapitalisme melalui kebijakan modernisasi perikanan telah mendorong akselerasi eksploitasi sumber daya perikanan, sehingga terjadi kelangkaan sumber daya perikanan. Kelangkaan sumber daya perikanan berdampak pada penurunan produktivitas dan pendapatan nelayan. Kondisi demikian yang menjadi faktor mendasar timbulnya kemiskinan nelayan.

Kata Kunci: modernisasi perikanan, kebudayaan nelayan, kelangkaan sumber daya perikanan, penetrasi kapitalisme, dan kemiskinan nelayan.

Sejak tahun 80-an masalah kemiskinan nelayan telah menjadi perhatian akademik dan objek kajian dari para peneliti masyarakat nelayan setelah satu dasawarsa lebih berlangsungnya modernisasi perikanan yang dimulai pada awal tahun 70-an. Dari segi kebijakan, isu kemiskinan masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir telah mendorong pemerintah menginisiasi program-program pemberdayaan ekonomi dalam skala yang luas, tidak hanya pada perikanan tangkap dan budidaya (tambak dan perairan pantai), tetapi sektor ekonomi pesisir lainnya, seperti pengembangan budidaya rumput laut, pemberdayaan petani garam, dan pengolahan hasil tangkap.

Kalau kita memahami secara komprehensif, kemiskinan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks (Kusnadi, 2006:11-24). Hal ini berarti bahwa untuk menangani masalah kemiskinan nelayan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan implementasi kebijakan yang simultan. Namun dalam makalah ini, hanya dibahas tentang masalah kelangkaan sumber daya perikanan yang berdampak pada timbulnya kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan dalam konteks apakah persoalan tersebut disebabkan oleh akibat dari penetrasi kapitalisme yang menyertai kebijakan modernisasi perikanan secara intensif pada awal tahun 1970-an atau karena praktek kebudayaan masyarakat nelayan. Subjek kajian ini adalah upaya mengurai satu demi satu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan nelayan, khususnya pada aspek budaya yang belum banyak memperoleh perhatian akademis. Sebagaimana dikatakan oleh antropolog Hildred Geertz (1981:42), meskipun dari segi sosial-budaya sangat penting, tetapi masyarakat pesisir di Kepulauan Indonesia masih sedikit sekali diteliti secara ilmiah, yang hasilnya dipublikasikan secara luas. Artinya, objek kajian kebudayaan merupakan peluang yang masih terbuka, khususnya dalam kaitannya dengan kemiskinan nelayan.

PENETRASI KAPITALISME

Sejak awal tahun 1970-an, revolusi biru (*blue revolution*) atau modernisasi perikanan (*fishing*) menandai babak baru pembangunan di sektor perikanan tangkap yang bersifat kapitalistik. Penetrasi kapitalisme memasuki desa-desa nelayan dengan membonceng pada kebijakan modernisasi perikanan. Orientasi demikian seiring dengan perubahan paradigma pembangunan negara Orde Baru yang menekankan pertumbuhan ekonomi. Dari pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan tercipta pemerataan atau penetesan hasil-hasil pembangunan pada tataran masyarakat (*trickle down effect*). Sektor perikanan tangkap merupakan salah satu sektor pembangunan yang menopang orientasi pertumbuhan ekonomi melalui modernisasi perikanan, dengan mekanisasi dan perubahan alat tangkap yang lebih canggih. Selain itu, pemerintah menyiapkan dukungan modal dan pemasaran hasil tangkapan dengan dibangunnya lembaga-lembaga ekonomi koperasi, seperti KUD Mina/TPI di desa-desa nelayan yang potensi ekonomi kelautannya cukup besar.

Sebenarnya dasar-dasar orientasi kapitalistik dalam aktivitas perikanan tangkap sudah terjadi sejak masa kolonial. Beberapa ciri yang menandai orientasi kapitalistik ini adalah: (a) produk perikanan tangkap tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sehari-hari saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pasar atau konsumsi publik; (b) produk perikanan tangkap sudah menjadi komoditas ekspor-impor dan pasar yang dijangkau sangat luas; (c) atas dasar kedua faktor tersebut,

kualitas teknologi sarana penangkapan dan modal usaha terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan; dan (d) harga ikan sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi pasar. Atas dasar keempat hal tersebut, ikan merupakan komoditas kapitalistik (Masyhuri, 1996: 157-167).

Modernisasi perikanan merupakan kebijakan pembangunan yang bersifat padat modal dan teknologi. Biaya-biaya untuk akses dan pemilikan teknologi penangkapan, seperti perahu, mesin, dan jaring cukup mahal. Biaya rekrutmen tenaga kerja dan biaya operasional melaut juga tidak sedikit. Kecanggihan sarana penangkapan mengharuskan nelayan pemilik mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengoperasikannya. Karena usaha perikanan tangkap itu adalah usaha yang penuh risiko, para nelayan harus memiliki kesiapan mental untuk menghadapi kerugian. Jika usaha ini berhasil dan berlanjut dengan baik, nelayan juga akan menanggung keuntungan ekonomi yang berlipat ganda. Kegagalan menjalankan usaha penangkapan akan mengantarkan nelayan menjadi bangkrut secara signifikan serta sebaliknya keberhasilan dalam usaha dapat mendukung nelayan menjadi orang yang sukses ekonomi dan kaya raya.

Misi yang akan dicapai melalui kebijakan modernisasi perikanan itu adalah meningkatnya produktivitas hasil tangkapan, yang kemudian diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sosial masyarakat nelayan. Tujuan kebijakan ini tidak memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan dan kerusakan ekosistem laut yang bakal terjadi. Jaring *trawl* diperkenalkan dan dioperasikan di berbagai daerah, seperti di Pantai Utara Jawa, dan berfungsi efektif untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan. Akan tetapi, operasi jaring ini mendapat perlawanan terbuka dari nelayan-nelayan tradisional di berbagai daerah yang merasa dirugikan dan kalah bersaing, sehingga memancing kecemburuan sosial. Sebagian nelayan tradisional yang lain bersikap akomodatif, dengan bekerja sebagai nelayan buruh (*pandega*) di kapal-kapal *trawl*. Strategi ini ditempuh untuk bisa bertahan hidup karena hasil tangkapan yang mereka peroleh dengan perahu-perahu kecil terus menurun (Mubyarto, Soetrisno, dan Dove, 1984:33).

Pada akhirnya, karena pertimbangan kepentingan stabilitas politik nasional, pemerintah melarang penggunaan jaring *trawl*, khususnya di wilayah Indonesia Barat pada tahun 1980. Namun untuk jenis jaring lain, seperti *purse seine* (sleret/slerak) yang dioperasikan bersamaan dengan jaring *trawl* tetap berlanjut penggunaannya sampai dengan sekarang. Meskipun *trawl* dilarang, masyarakat nelayan memiliki kemampuan kreatif dan inovatif membuat desain jaring sejenis *trawl* yang diberi nama dengan istilah-istilah lokal, termasuk jaring *cantrang* yang sekarang dilarang oleh pemerintah. Di Perairan Probolinggo, Pasuruan, dan Lamongan sebagian besar nelayan tradisionalnya sudah mengoperasikan jaring *minitrawl*. Operasi dari berbagai jenis jaring itu telah meningkatkan kuantitas eksploitasi terhadap sumber daya perikanan setempat.

Pengenalan dan pemakaian suatu jenis jaring baru sering memicu konflik dengan nelayan tradisional yang tidak mengoperasikan jenis jaring baru tersebut. Sebagai contoh di Muncar ketika pada awal tahun 1970-an diperkenalkan jaring *purse seine*, ternyata hal ini memancing reaksi anarkhis dari nelayan tradisional setempat. Demikian juga ketika jaring *minitrawl* mulai dipakai oleh sebagian kecil nelayan-nelayan tradisional di Lamongan Timur, Probolinggo, dan Pasuruan, hal ini memicu konflik dengan nelayan tradisional yang menentang pengoperasian jaring tersebut. Protes sosial berlangsung setiap hari. Konflik alat tangkap ini adalah sebuah proses sosial yang harus dilalui sebelum penerimaan secara total jaring *minitrawl* oleh masyarakat nelayan setempat. Di Lamongan, jaring *minitrawl* itu disebut dengan istilah *payang* dan istilah ini untuk mengelabui karakter "trawl" pada jaring *minitrawl* tersebut.

Di beberapa daerah, pengenalan dan pengoperasian jaring *purse seine* sebagai bagian dari modernisasi perikanan tidak berlangsung bersamaan. Di Madura Timur, jaring *purse seine* mulai dioperasikan oleh nelayan lokal pada awal tahun 1980-an, sedangkan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo mulai tahun 1990. Kehadiran jenis jaring baru tersebut telah menggusur jaring *payang* yang selama ini digunakan oleh nelayan setempat. Di Puger, Jember Selatan, jaring *purse seine* tidak dapat dioperasikan oleh nelayan setempat karena dikhawatirkan terjadi ketimpangan pendapatan dan kecemburuan sosial. Nelayan-nelayan di Puger sampai sekarang tetap setia mengoperasikan jaring *payang*. Jaring *minitrawl* juga dilarang dioperasikan di perairan Situbondo. Sampai sekarang untuk wilayah Jawa Timur bagian Timur dan Madura Timur, jaring *purse seine* merupakan jaring tercanggih yang dimiliki oleh masyarakat nelayan.

Operasi jaring *minitrawl* tidak hanya mempercepat proses pengurusan sumber daya perikanan, tetapi juga mempercepat kerusakan ekosistem laut, seperti terumbu karang. Jaring ini bermata sangat kecil sehingga berbagai macam biota laut dapat dijaring. Kerusakan terumbu karang akan mengganggu mata rantai siklus kehidupan ikan. Karena hamparan terumbu karang mengalami kerusakan dan tidak lagi menjadi habitat ikan, maka stabilitas stok sumber daya perikanan di perairan setempat terus berkurang.

Keterbatasan stok sumber daya perikanan merupakan petunjuk bagi nelayan bahwa upaya memperoleh hasil tangkapan yang memadai merupakan pekerjaan yang semakin sulit.

Dalam kasus di Desa Pesisir, pengoperasian jaring *purse seine* sejak 1990 telah mendongkrak produktivitas tangkapan nelayan setempat. Akan tetapi, produktivitas yang tinggi hanya berjalan sekitar lima tahun dan pada tahun 1995 kuantitas tangkapan mulai menurun hingga sekarang. Bahkan pada awal tahun 2000-an terjadi paceklik ikan yang cukup lama, sehingga nelayan setempat harus mencari pekerjaan ke luar kabupaten. Pada tahun 2004, ikan mulai muncul kembali. Penurunan produktivitas di tingkat Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada data berikut ini: pada tahun 2000 jumlah produksi sebesar 10.483,70 ton, sedangkan pada tahun 2013 hanya mencapai 7.870,92 ton (Kusnadi, 2015:20-26). Penurunan jumlah tangkapan berpengaruh langsung terhadap tingkat pendapatan ekonomi nelayan.

Bagi nelayan-nelayan kecil di Desa Pesisir, seperti nelayan pancingan yang menangkap jenis ikan tongkol atau layang sebagaimana dilakukan oleh nelayan *purse seine*, kehadiran perahu *purse seine* telah berakibat pada terjadinya penurunan hasil tangkapan ikan. Biaya operasi sering tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh dalam sekali melaut. Mereka menganggap perahu *purse seine* telah mengurus jenis-jenis ikan yang biasa ditangkapnya. Karena kesulitan dan ketiadaan sumber daya perikanan di perairan pantai, mereka harus beroperasi ke tengah laut. Jangkauan daerah tangkapan semakin jauh ke tengah laut dan membutuhkan biaya operasi yang besar. Dalam persaingan memperebutkan sumber daya perikanan di antara para nelayan yang memiliki kualitas alat tangkap berbeda, maka tingkat produktivitas dan pendapatannya juga akan mengalami ketimpangan.

Selama tahun 1996-2008, kondisi masyarakat nelayan di Desa Pesisir tidak banyak berubah karena sebanyak 90,76% warga masyarakatnya tergolong penduduk miskin dan rawan miskin. Mereka menghadapi situasi kemiskinan yang terus-menerus berlangsung (*continuing poverty*) tanpa tahu kapan berakhirnya. Sektor perikanan tangkap menghadapi situasi involutif (*fishing involution*) sehingga kurang berkontribusi untuk mendorong pencapaian kesejahteraan sosial nelayan (Kusnadi, 2013:49-50). Daya dukung lingkungan di Perairan Selat Madura tidak dapat lagi dieksploitasi secara optimal untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat nelayan. Seiring dengan intensifnya pengoperasian alat tangkap yang semakin canggih, sumber daya perikanan tangkap di Perairan Selat Madura telah menjadi barang langka yang sulit diperoleh nelayan.

Sebagai sebuah desa nelayan, masyarakat Desa Pesisir juga telah memperoleh program-program pemberdayaan, seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dari Bappenas (1995), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dari Departemen Pekerjaan Umum (1999/2000), Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dari Departemen Kelautan dan Perikanan (2003), dan program-program sejenis dari departemen/kementerian yang lain. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan pendidikan dan pelatihan bagi sebagian kaum perempuan pesisir agar memiliki ketrampilan mengembangkan usaha ekonomi alternatif. Meskipun demikian, keseluruhan program tersebut belum mampu mengantarkan pada pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat nelayan.

Selain hal-hal di atas, kelangkaan sumber daya perikanan berpotensi meningkatkan kompetisi di antara nelayan untuk memperebutkan dan mendapatkannya secara optimal. Jika masing-masing pihak tidak menyadari kondisi yang demikian, perebutan itu akan berlangsung di daerah-daerah tangkapan (*fishing grounds*) yang memiliki potensi stok sumber daya perikanan. Dengan berbagai cara, mereka akan membenarkan tindakan masing-masing untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan yang tersedia, termasuk dengan melanggar aturan-aturan konvensional yang selama ini diberlakukan secara kultural. Ketidakmampuan mengendalikan nafsu menguasai dan mengeksploitasi sumber daya berpeluang memicu terjadinya konflik terbuka di antara nelayan pengguna sumber daya perikanan.

Secara umum, kondisi perairan Pantai Utara Jawa dan Selat Madura mengalami kondisi tangkap lebih (*overfishing*) yaitu suatu kondisi yang menggambarkan ketidakseimbangan antara jumlah orang/armada perahu yang beroperasi di suatu perairan dengan kuantitas sumber daya perikanan yang dapat dieksploitasi. Secanggih apa pun peralatan tangkap yang dioperasikan di perairan yang mengalami kondisi tangkap lebih, hal ini tidak akan meningkatkan kuantitas hasil tangkapan, pendapatan nelayan, dan kesejahteraan sosialnya. Jika praktek penangkapan yang overeksploitatif terus berlanjut dan kelangkaan sumber daya perikanan akan meningkat, maka kemiskinan nelayan semakin terlembaga dari masa ke masa sehingga menyulitkan semua pihak untuk mengatasinya.

DAMPAK PRAKTEK KEBUDAYAAN

Secara antropologis dipandang dari segi karakteristik matapencahariannya, masyarakat nelayan termasuk kategori masyarakat berburu. Sebagian besar dari mereka hanya berpikir "mengambil saja" sumber daya perikanan yang tersedia di laut, sangat sedikit yang berpikir untuk memperhatikan

kelestariannya agar pemanfaatan sumber daya tersebut dapat berlangsung sepanjang hayat (Kusnadi, 2009:126-127). Nelayan mengambil peran utama sebagai pengguna sumber daya kelautan. Nelayan dan kebudayaannya adalah unsur sosial budaya terpenting dalam mengonstruksi kebudayaan masyarakat pesisir. Laut dan kondisi lingkungan yang menyertainya merupakan ruang terbuka yang memfasilitasi interaksi antara nelayan dengan sumber daya perikanan dan berkontribusi terhadap karakteristik kebudayaan masyarakat di kawasan pesisir. Hubungan yang intensif antara nelayan, laut, dan sumber daya perikanan berkontribusi terhadap karakteristik sosial budaya masyarakat di kawasan pesisir.

Masyarakat pesisir sangat menghargai mobilitas kerja dan bekerja sama dalam kegiatan matapencaharian hidup. Orientasi ekonomi untuk memperoleh keuntungan dari pekerjaannya sangat besar. Orang-orang di kawasan pesisir memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap hal-hal yang bersifat jasmaniah, yang mereka pelihara dengan gigih, penuh persaingan, dan keahlian teknis. Mereka hidup dengan "mentalitas saudagar". Ciri khas terpenting dari kebudayaan pesisir adalah adanya suatu mobilitas sosial yang berdasarkan haus gengsi pribadi dan kelompok. Cara pandang pesisir sangat cocok dengan sikap-sikap orang yang suka berprestasi atas dasar persaingan terbuka di antara mereka (Boelaars, 1984:72).

Kompetisi terbuka di laut untuk berebut sumber daya perikanan dan keberhasilan memenangkan persaingan melahirkan sikap untuk menghargai dan menjunjung tinggi kesuksesan (*prestasi*) yang diraih dengan kerja keras. Kesuksesan tersebut berdampak pada keuntungan-keuntungan ekonomi yang kemudian menjadi salah satu indikator dari hidup yang berhasil dan bermakna. Oleh sebab itu, bagi masyarakat nelayan, kesuksesan, dan ketidakberhasilan selalu ditampakkan secara publik dengan penanda materinya (Kusnadi, 2000:64). Kesuksesan ekonomi dipahami sebagai takdir dan hasil jerih-payah, sehingga tidak mengundang adanya kecemburuan sosial ekonomi di masyarakat. Karena itu, meskipun suasana kebatinan di kampung-kampung nelayan sedemikian kontras karena terjadinya kesenjangan ekonomi antara sebagian kecil warga masyarakat yang memperoleh kemakmuran dan sebagian besar warga dalam keadaan kekurangan, konflik sosial berbasis ekonomi tidak pernah terjadi. Kesenjangan status ekonomi itu juga diantisipasi dengan berfungsinya pranata-pranata yang memfasilitasi berlangsungnya pertukaran sumber daya sosial ekonomi.

Rumah tangga nelayan-nelayan yang sukses akan ditandai dengan pemilikan tanda-tanda materi yang bisa disaksikan oleh mata orang banyak, seperti rumah yang megah, perhiasan yang banyak, perahu yang lebih dari satu, pemilikan/sewa sawah yang luas, mobil yang mahal, dan sebagainya. Demikian juga, bagi rumah tangga nelayan yang gagal (miskin) akan ditandai dengan kondisi rumah yang buruk, miskin harta dan tabungan, serta tidak memiliki barang-barang berharga lainnya. Bagi nelayan yang berhasil secara ekonomi dan sosial, harus diperkuat dengan sukses kultural, yaitu dengan naik haji. Keberhasilan hidup ini ditandai dengan penguasaan atas: *modal ekonomi* (sukses usaha ekonomi dan memiliki harta yang cukup atau lebih dari cukup), *modal sosial* (ikut berperan memberi pekerjaan kepada warga di tempat usaha yang dimiliki), dan *modal kultural* (sudah naik haji, baik hati, dan suka beramal). Orang-orang yang sukses hidupnya dan memiliki kemampuan sosial, ekonomi, dan kultural, seperti pemilik perahu atau pedagang perantara merupakan "pusat orientasi sosial" atau "contoh kehidupan yang ideal", sehingga menjadi harapan masa depan bagi anak-anak nelayan dan pemuda di kawasan pesisir.

Untuk mencapai hal-hal di atas, nelayan harus bekerja keras memperoleh hasil tangkapan yang banyak dan isterinya di darat juga harus berusaha untuk memperbanyak pendapatan rumah tangga. Pada umumnya, dalam masyarakat nelayan, rumah tangga yang berhasil dan mampu menguasai tiga jenis modal usaha di atas adalah jika anggota-anggota keluarga memiliki usaha ekonomi dan bekerja sama dalam mengelola aktivitas ekonomi keluarga. Kerja keras untuk mencapai kekayaan merupakan jalan menuju kesejahteraan dan hal ini menjadi fokus dalam pikiran dan tindakan keluarga nelayan. Spirit untuk meraih keberhasilan hidup menjadi basis perilaku ekonomi masyarakat nelayan, sebagaimana dinyatakan oleh seorang pemilik perahu *purse seine* di Desa Pesisir, "Setiap hari yang menjadi konsentrasi pikiran para pemilik perahu di sini adalah bagaimana perahu dapat memperoleh hasil tangkapan (ikan) yang banyak. Kita berzikir dan berdoa setelah sembahyang (*sholat*), yang selalu diminta kepada Allah adalah agar harapan tersebut (hasil tangkap yang banyak) dapat dikabulkan" (Kusnadi, 2002:110).

Berbagai upaya dilakukan oleh nelayan untuk mendukung kerja keras agar tercapai kesuksesan ekonomi dan kesejahteraan hidup. Mereka rajin mendatangi dukun atau kyai (*nyabis*) untuk mendapatkan doa keselamatan dan kelancaran rezeki karena bekerja di laut penuh dengan risiko dengan tingkat persaingan yang ketat (Kusnadi, 2000:82-83). Untuk menjamin agar stok ikan yang akan dijaring tersedia, mereka memasang *rumpon* (sarang ikan), sehingga ikan-ikan itu berkumpul di sekitar *rumpon*. Agar ikan bisa ditangkap sepanjang waktu (1 tahun masa penangkapan), nelayan berupaya mendesain, memiliki, dan mengoperasikan berbagai jenis jaring untuk menangkap berbagai jenis ikan

yang muncul sesuai dengan pergantian musim. Jaring-jaring yang merusak kelestarian sumber daya perikanan, seperti *minitrawl* atau *cantrang* merupakan hasil kreativitas dan inovasi nelayan untuk “menaklukkan sumber daya perikanan” secara totalitas. Karena perilaku yang demikian ini, secara ekologis nelayan dianggap sebagai predator bagi ikan (Juwono, 1998:12).

Dengan memperhatikan sifat dan karakteristik kebudayaan masyarakat berburu serta adanya pandangan/persepsi bahwa sumber daya perikanan merupakan sumber daya milik umum yang bersifat tak terbatas (*the image of unlimited resources*), overeksploitasi terhadap sumber daya perikanan berlangsung intensif di berbagai perairan, termasuk di perairan yang sudah dalam kondisi tangkap lebih. Ada ungkapan-ungkapan tradisional dari nelayan untuk menggambarkan bahwa sumber daya perikanan adalah sumber daya hayati yang tak terbatas jumlahnya, seperti dikatakan oleh nelayan Bugis: *Yapa nacappu balewe ku tasi'e narekko cappuni daung-daunge ku puttanangnge*, yang artinya, 'Ikan di laut tidak akan habis dan ikan akan habis kalau daun-daun di darat sudah habis'. Ungkapan-ungkapan lain yang sering kita dengar adalah sebagai berikut: “Ada laut, ada ikan!”; “Dayung basah, periu berisi”; “Laut dan ikan diciptakan Allah untuk manusia. Kalau ikannya habis, nanti akan ada lagi?” (Kusnadi, 2007:140-141).

Persepsi kebudayaan tentang laut dan sumber daya perikanan yang terkandung di dalamnya mendasari praktek-praktek penangkapan yang berlebihan dan juga merusak lingkungan. Sebagai contoh, perairan Lamongan, Probolinggo, dan Pasuruan yang sudah dalam kondisi lebih tangkap. Nelayan-nelayan setempat mengoperasikan jaring *minitrawl* yang justru semakin merusak dan memutus matarantai siklus kehidupan ikan. Ikan-ikan yang masih kecil dan memerlukan waktu untuk berkembang lebih lanjut ikut terjaring, selain itu terumbu karang di bawah laut juga rusak. Akibatnya, ruang hidup ikan menjadi terganggu, stok sumber daya perikanan semakin langka, dan ikan tidak mudah lagi ditangkap.

Kelangkaan sumber daya perikanan berdampak pada tidak adanya jaminan bahwa setiap nelayan yang melaut akan memperoleh hasil tangkapan yang baik. Selain itu, biaya-biaya melaut semakin meningkat dan mengharuskan nelayan bertindak selektif menentukan hari-hari melaut. Akibatnya, tingkat pendapatan nelayan menurun dan perolehannya menjadi tidak pasti. Upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan keluarga nelayan, khususnya dalam hal konsumsi pangan harian, menjadi terganggu. Fakta-fakta sosial ini menandai timbulnya kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan. Restorasi ekosistem laut dan pesisir untuk memulihkan stok sumber daya perikanan tidak akan berjalan efektif jika persepsi kebudayaan mereka terhadap eksistensi sumber daya perikanan tidak berubah. Kemiskinan nelayan merupakan akibat dari cara pandang yang salah tentang sumber daya perikanan. Dengan demikian, kebudayaan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan timbulnya kemiskinan nelayan.

KESIMPULAN

Modernisasi perikanan yang bersifat padat modal dan teknologi serta diorientasikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan kapitalistik memang memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas tangkapan nelayan. Peningkatan kuantitas produksi tangkapan ini diyakini sebagai jalan untuk mendongkrak pendapatan nelayan, meneteskan hasil pembangunan, dan menciptakan kesejahteraan hidup mereka (*trickle down effect*). Dukungan pembaruan teknologi penangkapan dan modal telah mempercepat proses pengurusan sumber daya perikanan, sehingga pada masa-masa berikutnya terjadi penurunan produksi dan kelangkaan sumber daya perikanan. Di beberapa wilayah perairan, seperti di Pantai Utara Jawa dan Selat Madura yang menghadapi situasi tangkap lebih, sudah tidak memungkinkan lagi berlangsungnya eksploitasi sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Penetrasi kapitalisme ke desa-desa nelayan yang membonceng kebijakan modernisasi perikanan merupakan faktor mendasar yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan sumber daya perikanan dan penurunan produktivitas tangkapan.

Unsur-unsur kognitif kebudayaan nelayan, seperti persepsi terhadap sumber daya perikanan sebagai sumber daya yang tak terbatas (*the image of unlimited resources*), orientasi materi sebagai indikator kesuksesan hidup dan basis gengsi/status sosial, serta penghormatan terhadap kompetisi terbuka untuk meraih prestasi, memainkan peranan yang sangat penting dalam membangun etos kerja maksimal atau mendorong kerja keras dan kerja kreatif untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan. Kegiatan penangkapan ikan tidak perlu mengindahkan aspek konservasi dan daya dukung lingkungannya. Penggunaan jaring yang merusak lingkungan, seperti *minitrawl* dan *cantrang* atau kegiatan penangkapan yang menghancurkan ekosistem laut (*destructive fishing*), seperti pengeboman ikan dan pelarutan potasium, tetap dilakukan asalkan dapat memperoleh jumlah tangkapan yang banyak dan keuntungan materi (pendapatan) yang tinggi. Dengan spirit penangkapan yang demikian, proses pengurusan potensi sumber daya perikanan berlangsung intensif dan mempercepat terjadinya

kelangkaan sumber daya perikanan. Nelayan memainkan peran sebagai predator sumber daya perikanan.

Kedua hal di atas, yaitu modernisasi perikanan dan kebudayaan nelayan, bersama-sama secara dialektis berkontribusi terhadap timbulnya kelangkaan sumber daya perikanan, penurunan produktivitas, dan pengurangan pendapatan. Praktek nilai-nilai budaya semakin invasif karena diberi ruang terbuka oleh orientasi pembangunan yang bersifat kapitalistik. Situasi kelangkaan sumber daya perikanan ini telah menyulitkan nelayan memperoleh hasil tangkapan yang layak untuk menopang kelangsungan hidupnya. Pendapatan dari kegiatan melaut tidak bisa diharapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya di bidang konsumsi pangan. Nilai dan kepastian perolehan pendapatan semakin sulit diprediksi. Kegiatan melaut menjadi sarat dengan spekulatif meskipun nelayan semakin selektif menentukan keputusan melaut untuk menghindari kerugian usaha. Praktek kebudayaan nelayan dan penetrasi kapitalisme yang mengikuti gerak modernisasi perikanan merupakan faktor signifikan yang menimbulkan kemiskinan nelayan dan melestarikan kemiskinan struktural itu di desa-desa pantai.

DAFTAR PUSTAKA

- Boelaars, Y. (1984). *Kepribadian Indonesia Modern: Suatu Penelitian Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Geertz, H. (1981). *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. Jakarta: Pulsar.
- Juwono, & Pujo Semedi, H. (1998). *Ketika Nelayan Harus Sandar Dayung: Studi Nelayan Miskin di Desa Kirdowono*. Jakarta: Konphalindo.
- Kusnadi (2000). *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kusnadi (2002). *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Yogyakarta: LKiS.
- Kusnadi (2006). *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kusnadi (2007). *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- Kusnadi (2009). *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-RuzzMedia.
- Kusnadi (2013). *Membela Nelayan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kusnadi (2015). *Pemberdayaan Perempuan Pesisir: Pengembangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Budidaya Rumput Laut*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Masyhuri (1996). *Menyisir Pantai Utara*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Mubyarto, Soetrisno, L., & Dove, M. (1984). *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*. Jakarta: Rajawali Pers.